

## DAFTAR PUSTAKA

1. RI, Kementrian Kesehatan, Global Health Workforce Alliance G. Rencana Pengembangan Tenaga Kesehatan Tahun 2011-2025 [Internet]. Jakarta: Kementrian Kesehatan RI; 2011. Available from: <http://r2kn.litbang.kemkes.go.id:8080/handle/123456789/62440>
2. RI K. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 tahun 2015 Tentang Akreditasi Puskesmas dalam standar ketenagaan disebutkan bahwa tenaga Kesehatan harus terpenuhi jumlah dan ketersediaannya dalam sebuah Puskesmas. Jakarta: Kementrian Kesehatan; 2015.
3. Nawawi M. Pengaruh Motivasi dan Kompetensi Tenaga Kesehatan Terhadap Kinerja Pusat Kesehatan Masyarakat. MIMBAR [Internet]. 2012;XXVIII. Available from: <https://www.neliti.com/id/publications/7437/pengaruh-motivasi-dan-kompetensi-tenaga-kesehatan-terhadap-kinerja-pusat-kesehat>
4. Bachtiar A. Pengembanagn Profesi Kesmas. Jakarta; 2014.
5. Rosiana M dkk. Analisis Pendayagunaan Tenaga Sarjana Kesehatan Masyarakat Di Rumah Sakit Umum Pusat Dokter Kariadi Kota Semarang Tahun 2013. J Kesehat Masy [Internet]. 2014;2(5). Available from: <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jkm/article/view/6417>
6. Revisi Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 [Internet]. Available from: <https://ppid.sumbarprov.go.id/home/details/3164-renstra-dinas-kesehatan-prov-sumbar-2016-2021.html>

7. RI KK. Peraturan Menteri Kesehatan No. 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2014.
8. Gani A Z. Penguatan Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas. Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat Kedeputian Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas. Jakarta; 2018.
9. RI KK. Undang-undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Jakarta: Kementerian Kesehatan; 2009.
10. RI KK. Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Jakarta: Kementerian Kesehatan; 2014.
11. RI KK. Peraturan Menteri Kesehatan No 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2019.
12. RI KK. Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2015.
13. Lestari T. Analisis ketersediaan Tenaga Kesehatan di Puskesmas Kota Mamuju Provinsi Sulawesi Barat tahun 2014. 2016. 21 p.
14. Notoadmojo S. Kesehatan Masyarakat Ilmu dan Seni. Jakarta: Rineka Cipta; 2007.
15. Triwibowo C& PM. Pengantar Dasar Ilmu Kesehatan Masyarakat. Yogyakarta: Nuha Medika; 2015.
16. Kartini F. Analisis Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Masyarakat (SKM) di Puskesmas Kota Padang. Universitas Andalas, Padang; 2016.
17. Kusmiyanti A. Peran SKM Dalam Pengembangan Upaya Kesehatan Tradisional dan Komplementer. Jakarta;

18. Syafri W& A. Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Organisasi Publik. Sumedang: Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Press; 2014.
19. Astiena AK. Manajemen Sumber Daya Manusia Kesehatan. Padang: Andalas University Press; 2015.
20. Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara RI. PerMenPANRB Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan. Jakarta: Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; 2011.
21. Nasional UP. Analisis Jabatan. Denpasar: Universitas Pendidikan Nasional; 2012.
22. Nofitasari D. Pengaruh Beban Kerja dan Motivasi Terhadap Kinerja Melalui Kepuasan Kerja Karyawan PT. Kimia Farma Diagnostik Kota Bandung. Bandung: UNPAS; 2015.
23. Badan Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan. Buku Manual Perencanaan Kebutuhan SDM Kesehatan Berdasarkan Standar Ketenagaan Minimal. Jakarta: Kementrian Kesehatan RI; 2015.
24. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 12 Tahun 2001 Tentang Pedoman Analisis Jabatan, editor. Jakarta; 2001.
25. Sandria M dkk. Peran Penetapan Job Description Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Jaya Bakti Raharja Sukabumi. J Ekobis Dewabtara. 2020;3(2).
26. Simamora H. Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN; 1997.
27. Az-Zahra, F dan Kamuljan S. Proses Penyusunan Uraian Pekerjaan Berdasarkan Tahapan Analisis Pekerjaan Staf Administrasi Undewriting

- Pada Perusahaan Asyransi Umum. URNAL Mhs BINA Insa. 2016;1(1):1–22.
28. Surat Keputusan Pengurus Pusat Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan Masyarakat Indonesia No: 005/AIPTKMI/1/2015.
  29. Ridwan M. Kajian Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi Tahun 2016. J Kesmas Jambi. 2017;1(2).
  30. Sedarmayanti. Bedah Buku Perencanaan & Pengembangan Sumber Daya Manusia. In: Perencanaan & Pengembangan Sumber Daya Manusia. Surabaya: Universitas Dr. Soetomo; 2017.
  31. Effendi M. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia; 2002.
  32. RI KK. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 374 Tahun 2009 Tentang sistem Kesehatan Nasional. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2009.
  33. Priansa D. Perencanaan dan Pengembangan SDM. Bandung: Alfabeta; 2014.
  34. Rachmawati I. Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: Penerbit ANDI Yogyakarta; 2008.
  35. Khairunnisa C. Eksistensi dan Peranan Kepala Dinas Kesehatan dalam meningkatkan Pelayanan Kesehatan di Provinsi Aceh. J Kedokt dan Kesehat Malikussaleh.
  36. Sugiyono. Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. Bandung: Alfabeta; 2009.

37. Sugiyono. Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan RD. Bandung: Alfabetha; 2013.
38. Putri ZAP. Analisis Perencanaan Kebutuhan Tenaga Kesehatan Masyarakat (SKM) di Puskesmas Wilayah Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman. Universitas Andalas; 2018.
39. Guspianto. Analisis Penyusunan Rencana Kebutuhan Sumberdaya Manusia (SDM) Kesehatan Puskesmas di Kabupaten Muaro Jambi. Pros Semin Nas Kesehat. 2012;
40. Asparian. KAJIAN PENEMPATAN SUMBER DAYA MANUSIA SARJANA KESEHATAN MASYARAKAT (SKM) PADA TINGKAT PELAYANAN DASAR DI KABUPATEN BATANGHARI TAHUN 201. J Kesmas Jambi. 2017;1(2).
41. Suparman R. KESIAPAN TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT (SARJANA KESEHATAN MASYARAKAT) UNTUK BERMITRA DENGAN FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DALAM UPAYA PROMOTIF DAN PREVENTIF. J Ilmu Kesehat Bhakti Husada. 2019;10(2):98.

